

Merajut Solusi Berkeadilan atas Ketimpangan Politik dan Sosioekonomi Nelayan Kapal Mini Purse Seine di Sarang Rembang

Nely Rahmawati Zaimah¹, Risty Kamila Wening Estu², Marita Ika Joesidawati³

^{1,2}) Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Rembang, Indonesia

³) Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Indonesia

 Email : nelyrahmawati@staialanwar.ac.id

Received : 14-06-2025

Revised : 22-06-2025

Accepted : 23-06-2025

Abstract

This study examines the socio-economic disparity between two groups of coastal fishermen in Sarang, Rembang—those operating freezer-equipped vessels and those using traditional ice-block methods. The research highlights how access to technology and unequal enforcement of local regulations create structural gaps in income, market access, and fiscal contribution. While freezer-equipped fishermen often bypass official auction markets (TPI) and avoid retribution fees, small-scale fishermen are burdened by formal charges, delayed payments, and limited distribution channels. Using a mixed-method approach grounded in distributive justice theory (Rawls) and institutional economics (North), this study combines statistical analysis and field interviews to uncover how unequal access to subsidies and market mechanisms impacts collective welfare. The findings reveal that higher fiscal burdens fall disproportionately on those with fewer resources, weakening trust in cooperatives and local fishery institutions. The study offers critical insight into how structural inequities in marine resource governance can fragment social cohesion and undermine sustainability in traditional fishing communities.

Keywords: Socio-Economic Disparity, Coastal Fisherman, Freezer-Equipped Vessels, Distributive Justice, Institutional Economics, Market Access

A. Pendahuluan

Komunitas nelayan mini purse seine di Sarang Rembang di beberapa tahun terakhir ini terbagi dua kutub despirasi yang sangat berbeda (Fatmawati et al., 2020; Merdiana et al., 2024). Pertama adalah kelompok dominan, kelompok nelayan kapal yang memiliki teknologi berpendingin dan bermodal besar, biasa melaut dua kali lebih lama, dan dapat menjual langsung ke pedagang besar yang dikehendaknya. Berbeda dengan nelayan kecil manual yang masih bergantung pada es balok tradisional, melaut lebih singkat, serta masih diwajibkan untuk menjual melalui tempat pelelangan ikan (TPI) sebagaimana peraturan



© The Author(s). 2018 Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

perundangan yang berlaku. Disparitas ini bukan sekadar soal ekonomi, sebagaimana pernah disentil oleh Abdullah dan rekan-rekannya (S. Abdullah et al., 2023), melainkan juga politis yang menyangkut akses subsidi BBM, perlakuan institusional, dan mekanisme distribusi hasil tangkapan yang tidak setara.

Jauh hari, Perpres 191 Tahun 2014 telah menegaskan pembagian BBM menjadi jenis subsidi dan non-subsidi, di mana nelayan dengan kapasitas kapal kurang dari 30 GT (gross ton) masih mendapat akses atas solar bersubsidi melalui sistem pendistribusian tertutup yang diatur BPH Migas dan Pertamina (*PERPRES No. 191 Tahun 2014*). Sementara itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2015, meski telah dicabut pada tahun 2020, sempat mewajibkan surat rekomendasi pembelian solar khusus untuk kapal perikanan. Kapal nelayan di Sarang adalah berjenis mini purse seine yang berkapasitas kurang dari 30 ton—baik itu kapal berteknologi pendingin (*freezer-equipped vessels*) ataupun manual yang masih menggunakan es balok.

Di berbagai kabupaten di pesisir Jawa Tengah seperti Rembang, Pati, Jepara, dan Batang, telah diterbitkan sejumlah Peraturan Daerah yang mewajibkan nelayan menjual hasil tangkapan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Peraturan daerah ini merupakan turunan implementatif langsung dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 45 Tahun 2009 yang mengamanatkan pengelolaan perikanan yang mencakup pemberdayaan nelayan kecil dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) sebagai jalur pemasaran resmi hasil tangkap (*jdih.bpk.go.id*). Sistemika lelang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (LN 2007 No. 134) yang mencantumkan bahwa pelelangan ikan di TPI dilakukan dengan sistem harga tertinggi dalam mekanisme lelang dan dikenakan retribusi. Tentunya, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan alokasi retribusi dan tata kelola yang diserahkan pada Pemerintah daerah. Lebih spesifik, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2021 juga menegaskan tata cara penetapan nilai produksi ikan pada saat didaratkan, mengatur tata kelola teknis penimbangan, penentuan harga lelang, dan mekanisme penanganan hasil tangkapan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat tegas dalam tata aturan dan tata kelola hasil tangkapan yang musti berlandaskan asas ketertiban ekonomi yang berkeadilan, sehingga tidak dapat disalah-gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tetapi dewasa ini di kecamatan Sarang, Rembang, TPI sebagai satu-satunya jalur legal distribusi ikan, banyak diabaikan oleh para nelayan, para pedagang ikan bahkan pengelola TPI sendiri yang gagap mengelola hasil tangkap berpendingin. Semenjak teknologi kapal berpendingin dikenalkan kepada masyarakat pesisir Rembang, peraturan lelang ini tidak sepenuhnya dijalankan secara merata. Hanya para nelayan kapal konvensional atau manual yang menggunakan sistem sederhana dan tanpa fasilitas pendingin tidak memiliki banyak pilihan selain tunduk pada sistem lelang TPI. Mereka harus menanggung beban retribusi, potongan administrasi, keterlambatan pencairan hasil penjualan, serta risiko menurunnya mutu ikan. Ditambah peliknya sistem pencairan uang hasil lelang yang dianggap terlalu

lambat hingga sehari-hari sehingga membuat nelayan menunda keberangkatannya untuk kembali melaut (Fatmawati et al., 2020).

Sebaliknya, nelayan bermodal besar yang mengoperasikan kapal mini purse seine dan dilengkapi freezer seringkali menjual hasil tangkapan langsung kepada bakul tanpa melalui lelang di TPI, yang artinya mereka luput dari retribusi dan hanya dibebani biaya sandar di dermaga sebesar satu juta rupiah atau sedikit lebih besar, yang tidak jelas tata aturan dan kelolanya. Tentunya pembiasaan ini timbul karena tendensi bahwa pembayaran dari bakul yang ditunjuk langsung membaya mereka kontan, dan mekanisme pemilahan dan pengemasan ikan yang jauh berbeda dengan metode es balok manual. Uniknya, kapal-kapal ini tetap memperoleh solar bersubsidi dalam jumlah besar, tidak seperti di daerah lain seperti Pati dan Pekalongan, karena kapasitas sesuai perizinan tangkap mereka masih dibawah 30 gross ton (Prasetyo et al., 2016; Purwantini & Saraswati, 2022). Kondisi ini menandakan adanya inkonsistensi penerapan kebijakan dan lemahnya pengawasan perda. Praktik ini menimbulkan kesenjangan struktural yang semakin nyata antara dua kelas nelayan di Sarang. Di satu sisi terdapat kelompok yang patuh namun tertekan oleh regulasi, sementara di sisi lain ada kelompok yang mampu menghindari kewajiban formal dan mendapatkan keuntungan lebih besar melalui jalur distribusi informal yang tidak tersentuh retribusi daerah.

Penelitian ini begitu relevan karena fenomena tersebut di atas selalu berkaitan langsung dengan keadilan sosioekonomi dan keseimbangan distributif yang mengarah ke fiskal daerah. Pemerintah daerah melalui TPI akan semakin kehilangan potensi pendapatan asli daerah jika nelayan manual semakin menyusut jumlahnya, dan tidak ada regulasi khusus untuk kapal freezer. Secara tidak langsung, isu ini juga berkaitan dengan integritas kelembagaan lokal dan juga pemangku kebijakan. Disparitas hasil dan rancunya mekanisme distribusi, akan menjadikan kesenjangan yang semakin jauh antara dua kelompok nelayan, dan berakhir dengan kelayakan subsidi. Tentunya, jangan sampai subsidi yang diciptakan untuk kesejahteraan justru memperlebar jurang antara yang kuat dan yang lemah. Dengan menguak gap regulasi dan praktik di lapangan, studi ini diharapkan dapat memberikan peta jalan kebijakan yang lebih inklusif: mencakup model kebijakan baru berbasis kebutuhan operasional, skema retribusi proporsional, dan optimalisasi koperasi sebagai strategi kelembagaan yang dapat memperkuat posisi tawar nelayan kecil.

Penelitian ini berfokus untuk menggali potensi-potensi berkeadilan, yang meliputi isu-isu sebagai berikut; pertama adalah sistem subsidi BBM yang hanya berbasis kapasitas kapal, tidak kepada kubutuhan dan kontribusi terhadap sosioekologi perikanan lokal yang marginal; kedua adalah merancang formulasi lelang dengan penentuan tarif retribusi alternatif terhadap nelayan freezer melalui TPI dan tetap menggunakan sumber daya bersama; serta yang terakhir adalah penguatan kelembagaan nelayan kecil untuk mengakses logistik, teknologi, dan pasar secara lebih adil. Jika sebagian besar bakul besar memiliki saham kepemilikan kapal berpendingin, maka iklim kompetisi semakin tergerus dan ditinggalkan. Hipotesis utama dalam penelitian ini adalah: pertama, bahwa nelayan

freezer memiliki akses subsidi dan hasil tangkapan yang jauh lebih besar dan pasar yang lebih luas atau tepat dibandingkan nelayan manual; dan kedua, bahwa ketidakterlibatan nelayan freezer dalam sistem pelelangan dan retribusi TPI menyebabkan ketimpangan fiskal dan memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi nelayan manual. Diharapkan penelitian ini menjadi sebuah solusi terhadap tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang dinamis dan berintegritas, terutama bagi masyarakat nelayan, untuk mewujudkan ekonomi nelayan Jawa Tengah yang berdaya saing—sebagaimana dicita-citakan oleh Syatori (2016) dan Murtaqi et al. (2023).

Berbagai penelitian sebelumnya menggarisbawahi bahwa ketimpangan ekonomi dalam komunitas nelayan Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan alat tangkap atau hasil tangkapan semata, tetapi juga oleh relasi kuasa dalam distribusi hasil, struktur patron-klien, dan ketimpangan akses terhadap kebijakan negara. Roberts et al. (2022) meneliti dominasi patron terhadap rantai nilai perikanan di wilayah kepulauan Indonesia, di mana tengkulak dan pemodal menguasai titik krusial distribusi seperti lelang dan penjualan akhir. Stacey et al. (2021) menunjukkan bahwa nelayan kecil dan perempuan sering kali kehilangan suara dalam pengambilan keputusan komunitas, terjatuh utang, dan sulit keluar dari posisi marginal. Di Sarang sendiri, Fatmawati et al. (2020) telah mengidentifikasi keberadaan dua model pembagian hasil tangkapan—maro dan cacaran—yang relatif adil dalam komunitas, namun tak cukup menghadapi tekanan struktural dari distribusi pasar dan praktik bypass TPI. Masih sangat banyak runtut permasalahan dari titik isu-isu tersebut. Secara teoritis, penelitian ini menyasar kepada aneka ketimpangan yang dapat dijelaskan melalui konsep dualisme struktural (Lewis) yang membedakan dua sektor ekonomi dengan akses dan keuntungan tidak setara; teori keadilan distributif (Rawls) yang menuntut keberpihakan pada kelompok paling tertinggal; serta teori ekonomi kelembagaan (North) yang menempatkan institusi seperti TPI dan koperasi sebagai distributor BBM subsidi, sebagai aktor penting dalam pembentukan insentif dan ketimpangan struktural nelayan.

B. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan campuran (mixed-method) dengan desain convergent parallel—sebagaimana arahan Kerrigan (2014), di mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan untuk kemudian diintegrasikan. Secara kuantitatif, penelitian bersifat deskriptif-komparatif yang menaksir keuntungan ekonomi dua model kapal—mini purse seine dengan berpendinginan freezer chamber dan kapal tradisional yang menggunakan es balok—dengan variabel utama seperti volume tangkapan, durasi melaut, biaya operasional, subsidi bahan bakar dan besar retribusi TPI. Dengan skema Community-based Research, dua puluh responden nelayan dari kapal ber-freezer dan kapal manual telah diikutsertakan, dipilih secara purposive stratifikasi agar mewakili variasi umur, pengalaman melaut, dan lokasi dermaga. Fase kualitatif dilakukan di bulan Agustus-Desember 2024. Kuesioner terstruktur berfungsi untuk menghimpun data numerik yang kemudian diproses di perangkat lunak JASP.

Kuesioner terstruktur dalam penelitian ini disusun dengan format tertutup dan berskala, sehingga responden hanya perlu memilih jawaban dari opsi yang telah disediakan. Instrumen ini mencakup indikator terperinci dari setiap variabel ekonomi, seperti jumlah tangkapan per hari, jumlah bahan bakar yang digunakan, besaran subsidi yang diterima, dan jumlah retribusi yang dibayarkan di TPI. Format ini dirancang untuk memastikan konsistensi data, mempermudah pengkodean dan analisis statistik, serta meminimalkan bias interpretatif dari pihak peneliti.

Data kuantitatif dianalisis dengan pendekatan MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) menggunakan perangkat lunak JASP, untuk menguji perbedaan yang signifikan secara simultan pada beberapa variabel dependen – seperti pendapatan bersih kapal, modal operasional. Untuk kategori besaran retribusi dan faktor pembedanya dengan distribusi pasar – berdasarkan jenis kapal (manual vs. freezer), menggunakan analisis regresi linier. MANOVA dan regresi linier ala Durbin-Watson dipilih karena dapat menangkap hubungan lintas variabel dalam satu model analisis, sekaligus menilai pengaruh kategori kapal terhadap lebih dari satu indikator ekonomi secara bersamaan.

Sementara itu, analisis data kualitatif dilakukan melalui pendekatan tematik. Transkrip wawancara semi-terstruktur dimasukkan ke dalam perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Analisis kualitatif ini menargetkan pengalaman dan persepsi nelayan melalui dua puluh wawancara semi-terstruktur – sepuluh nelayan freezer dan sepuluh nelayan manual – ditambah wawancara mendalam dengan pengurus TPI, tengkulak, dan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Observasi partisipatif di dermaga pendaratan ikan dan area lelang TPI melengkapi data, sehingga peneliti dapat melihat langsung alur distribusi, proses lelang, dan praktik bypass retribusi oleh kapal freezer. Dokumentasi regulasi, mulai dari peraturan daerah tentang TPI hingga peraturan apapun mengenai subsidi BBM dan implikasinya di nelayan langsung.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Disparitas Sosio-Ekonomi Nelayan Kapal Freezer dan Kapal Manual Konvensional

Berikut ini adalah data rata-rata pendapatan kapal freezer (KF) dan kapal manual (KM) pada dua musim utama, yang menggambarkan perbandingan langsung antara kedua model usaha: pendapatan saat pasokan ikan rendah (musim paceklik) dan saat pasokan melimpah (musim tangkap). Tabel berikut akan mengawali analisis disparitas finansial pada masyarakat nelayan mini purse seine di Sarang Rembang.

Tabel 1. Perbedaan rata-rata pendapatan kapal nelayan mini purse seine ber-freezer dan manual

Aspek	Kapal Freezer	Kapal Manual
Rata-rata Pendapatan per trip	Musim paceklik: Rp 150–280 juta Musim tangkap: Rp 250–600 juta	Musim paceklik: Rp 40–60 juta Musim tangkap: Rp 50–110 juta
Fluktuasi Harga	Ikan beku: harga relatif stabil sepanjang tahun	Ikan segar: harga turun saat panen melimpah, baru naik saat paceklik
Modal Awal	Perbekalan, solar & jasa perawatan freezer: Rp 50–80 juta	Perbekalan & solar: Rp 20–30 juta
Skema Bagi Hasil	Biaya awal dipotong, termasuk jasa perawatan freezer, sisa keuntungan dibagi rata antara pemilik & seluruh awak kapal, pemimpin awak kapal atau juru mudi mendapatkan 4x pendapatan awak kapal.	Biaya awal dipotong, sisa keuntungan dibagi rata antara pemilik & seluruh awak kapal, pemimpin awak kapal atau juru mudi mendapatkan 3,5x pendapatan awak kapal.
Retribusi TPI	Bypass TPI – bebas retribusi (Biaya sandar Rp. 1 juta)	Wajib lelang, retribusi 3,5 % (nelayan 2 %, bakul 1,5 %)

Sumber : Wawancara partisipan September 2024-April 2025

Data menunjukkan adanya dua kelompok berbeda di kalangan nelayan Sarang Rembang, yaitu kelompok pemilik kapal mini purse seine ber-freezer dan nelayan tradisional ber-es balok. Pada musim paceklik – momen ketika suplai ikan langka – kapal ber-freezer mencatat pendapatan rata-rata antara Rp 150 juta hingga Rp 280 juta per trip, sedangkan kapal manual hanya memperoleh sekitar Rp 40 juta sampai Rp 60 juta. Kesenjangan ini semakin melebar pada musim tangkap ketika stok ikan melimpah; kapal ber-freezer masih mampu meraih Rp 250 juta hingga Rp 600 juta, sementara kapal manual hanya mengumpulkan Rp 50 juta hingga Rp 110 juta. Dengan kata lain, pendapatan kapal freezer rata-rata 5–6 kali lipat lebih tinggi daripada kapal manual, terlepas dari variasi musiman. Perbedaan skala ini langsung merembet ke kapasitas reinvestasi, keberlanjutan usaha, dan daya tahan finansial saat terjadi fluktuasi pasar.

Hal ini dipertegas dengan hasil perhitungan metrik yang terdiri dari beberapa variabel pengukuran, yaitu modal operasional (peralatan, BBM dan bahan makan), hasil

bersih (hasil penjualan dipotong operasional), pembagian untuk nelayan dan konvergensi retribusi dan tarif sandar sebagaimana tabel-tabel berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif (Rata-rata per trip)

	Modal Operasional (Juta Rp)		Pendapatan Bersih (Juta Rp)		Pendapatan Nelayan (ABK)		Retribusi	
	Freezer	Manual	Freezer	Manual	Freezer	Manual	Freezer	Manual
Valid	5	5	5	5	5	5	5	5
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	73.436	25.510	327.462	76.066	8.660	1.060	1.000	0.560
Std Deviation	4.631	1.678	132.354	8.311	2.730	0.114	1.000	0.134
Min	67.340	23.590	196.380	63.210	5.500	0.900	1.000	0.400
Max	79.260	27.260	490.670	85.440	12.000	1.200	1.000	0.700

Sumber : JASP

Tabel statistik deskriptif ini menggambarkan perbedaan signifikan antara kelompok kapal freezer dan manual dalam lima variabel ekonomi utama. Rata-rata modal operasional kapal freezer mencapai Rp73,436 juta, jauh lebih tinggi dari kapal manual yang hanya Rp25,510 juta. Pendapatan bersih kapal freezer (mean Rp327,462 juta) hampir lima kali lipat lebih besar dibandingkan kapal manual (Rp76,066 juta). Dampaknya terlihat pula pada pendapatan awak kapal (ABK), di mana nelayan freezer rata-rata memperoleh Rp8,660 juta, sedangkan manual hanya Rp1,060 juta. Selain itu, tingkat retribusi yang ditanggung kelompok freezer bernilai tetap (1.000), sedangkan manual memiliki variasi dengan rata-rata 0.560, menunjukkan ketidakseimbangan beban fiskal. Penyimpangan data (standar deviasi) juga memperlihatkan kelompok freezer memiliki variasi penghasilan yang jauh lebih besar, menandakan peluang atau potensi keuntungan yang tidak hanya lebih tinggi, tetapi juga dapat lebih fleksibel.

Tabel 3. MANOVA Pillai Test

Cases	df	Approx.F	Trace Pillai	Num df	Den df	p
(Intercept)	1	1870.968	0.998	2	7.000	<.001
Jenis Kapal	1	408.731	0.992	2	7.000	<.001
Residuals	8					

Sumber JASP

Hasil uji MANOVA yang ditampilkan melalui statistik *Pillai's Trace* menunjukkan pengaruh multivariat yang sangat signifikan antara jenis kapal (manual dan freezer) terhadap dua variabel dependen utama, yakni pendapatan bersih dan modal operasional kapal. Dengan nilai *Pillai's Trace* sebesar 0.992 dan nilai *Approx. F* sebesar 408.731 (df = 1;7) serta signifikansi $p < 0.001$, dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis kapal menjelaskan hampir seluruh variasi gabungan dari kedua variabel tersebut. Nilai Trace yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa efek jenis kapal terhadap dimensi ekonomi nelayan bersifat sangat kuat dan substansial. Ini berarti bahwa nelayan dengan kapal freezer, yang secara

struktural memiliki akses ke teknologi pendingin dan jalur distribusi informal tanpa melewati TPI, menunjukkan karakteristik pendapatan dan modal yang jauh berbeda dibandingkan kelompok nelayan manual. Secara teoritis, temuan ini menguatkan kerangka dualisme struktural Lewis (dalam Fields, 2004) di mana dua sektor ekonomi (tradisional dan modern) hidup berdampingan dalam sistem yang sama, tetapi dengan akses sumber daya yang timpang. Temuan ini turut memberi isyarat bahwa perlakuan fiskal dan logistik tidak boleh disamaratakan antar kelompok nelayan, sebab intervensi yang tidak adaptif justru dapat memperlebar jurang ketimpangan.

Faktor utama yang menjadikan perbedaan pendapatan ini mencolok adalah stabilitas harga. Ikan beku – hasil tangkapan kapal freezer – memiliki pasar tersendiri, di mana kualitas tetap terjaga dan harga relatif stabil sepanjang tahun. Ketika pasokan ikan “segar” melimpah, kapal manual yang menjual tanpa pendingin terpaksa menurunkan harga untuk menghindari pembusukan, sehingga margin keuntungan menyempit drastis, bahkan sangat drastis dan tidak masuk akal. Sebaliknya, pada musim paceklik, harga ikan beku sering kali justru naik karena ketersediaan di pasar terbatas, sehingga kapal freezer memperoleh surplus margin yang signifikan.

Dari sisi modal awal, kapal freezer juga memerlukan investasi jauh lebih besar: rata-rata Rp 60–80 juta untuk perbekalan, solar, dan jasa perawatan freezer per trip. Setelah modal awal dipotong, sisa keuntungan dibagi rata antara pemilik kapal dan awak, menciptakan insentif kolektif untuk memaksimalkan hasil tangkapan dan efisiensi operasional. Di sisi lain, kapal manual memulai dengan modal yang jauh lebih rendah, hanya Rp 20–30 juta per trip. Tetapi karena skala tangkapnya lebih kecil, dan biaya biaya per wadah (basket) ikan turut mengimbangi. Hanya kekhawatiran akan menurunnya kualitas ikan hasil tangkapan, akan mempengaruhi nilai jual. Akibatnya, meski lebih “ramah modal”, kapal manual tidak bisa memanfaatkan efek skala (economies of scale) yang membuat bisnis freezer menjadi lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

Aspek retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menambah kerumitan disparitas ini. Nelayan manual wajib melelang hasil tangkapannya dan dibebani retribusi total 3,5 %, dengan 2 % ditanggung oleh nelayan dan 1,5 % oleh bakul. Ketentuan ini mengurangi pendapatan bersih mereka secara proporsional di setiap proses tangkap (trip), nelayan manual harus menyiapkan dana ekstra untuk biaya lelang dan administrasi. Sementara itu, nelayan freezer kerap menjual langsung ke pedagang besar (‘bakul’), sepenuhnya mem-bypass TPI sehingga tak perlu menanggung retribusi. Satu-satunya biaya yang dikenakan adalah biaya sandar sebesar 1 juta per sandar, yang tidak ada landasan hukumnya sama sekali. Praktik bypass ini bukan sekadar strategi individual, tetapi telah menjadi model distribusi alternatif yang terstruktur secara informal. Dengan demikian, nelayan freezer tidak hanya melewati tarif retribusi, tetapi juga memperoleh kecepatan pembayaran dan hubungan dagang eksklusif yang semakin memperkuat posisi tawar mereka. Sungguh terlihat sangat tidak adil.

Secara fiskal, disparitas ini menimbulkan apa yang kita sebut kebocoran fiskal: pada tahun 2023, retribusi dari kapal freezer hanya menyumbang sekitar 8 % dari total penerimaan retribusi daerah, meski volume tangkapan mereka mencapai lebih dari 50 % dari total produksi ikan di Sarang. Kondisi ini menyebabkan melemahnya dana operasional TPI dan koperasi nelayan kecil—lembaga-lembaga yang semula dirancang untuk memfasilitasi distribusi adil dan pelatihan teknis. Tanpa dana yang memadai, TPI kesulitan memelihara fasilitas, mengadakan pelatihan standar mutu, atau memperluas jaringan pemasaran. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kepercayaan nelayan kecil terhadap lembaga kolektif (koperasi, paguyuban nelayan dan TPI sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah) dan semakin melemahkan kekompakan dan rasa kebersamaan dalam komunitas.

Implikasi sosial dari ketimpangan ini juga mendalam. Diskusi kelompok terfokus (FGD) mengungkap perasaan ketidakadilan yang mengakar di hati nelayan manual: mereka merasa “berjuang sendirian” dalam menanggung beban biaya, sementara nelayan freezer menikmati kebebasan operasional dan dukungan pasar yang lebih luas. Rasa curiga dan ketegangan antar kelompok memicu fragmentasi sosial; beberapa nelayan manual bahkan menolak bergabung dalam kegiatan koperasi atau kelompok paguyuban desa, karena khawatir kontribusi mereka akan disalahgunakan atau tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Kondisi ini mengancam kohesi sosial; tanpa kepercayaan, inisiatif kolektif seperti pembelian bahan bakar bergotong-royong atau sistem tabungan bersama tidak akan berjalan efektif.

2. Ketidakseimbangan Kontribusi Fiskal dan Dampaknya terhadap Distribusi Pasar

Adanya perbedaan kontribusi retribusi di TPI antara nelayan kapal freezer dan kapal manual memengaruhi distribusi hasil tangkapan serta akses mereka ke berbagai saluran pemasaran. Data kuantitatif yang dihimpun dari sepuluh partisipan—lima nelayan freezer dan lima nelayan manual—menunjukkan bahwa total retribusi (biaya sandar di dermaga) yang disetor kapal freezer rata-rata hanya 1 % atau bahkan kurang dari itu dari nilai penjualan, sedangkan kapal manual membayar rata-rata 2 % (ditanggung nelayan) ditambah 1,5 % oleh bakul, sehingga beban fiskal mereka mencapai 3,5 % per trip. Jika dihitung secara agregat, pada 100 trip dalam setahun (dari 5 partisipan kapal freezer dan 5 manual), kapal freezer hanya menyeter sekitar Rp 5,5 juta, sedangkan kapal manual menyeter Rp 21,0 juta. Perbedaan ini menciptakan ketimpangan aliran dana ke kas daerah dan mempengaruhi kapasitas TPI untuk mengelola jaringan distribusi, pelatihan mutu, dan pemeliharaan fasilitas.

Dampak langsung dari ketidakseimbangan fiskal ini tampak pada pola distribusi hasil tangkapan. Kapal freezer, yang mayoritas melakukan bypass biaya lelang dan menjual langsung kepada beberapa tengkulak besar—mendapat akses eksklusif ke pasar lintas daerah dengan harga yang realif lebih stabil. Contohnya untuk komoditas ikan layang, harga rata-rata Rp 13.500 per kilogram sepanjang tahun tanpa fluktuasi berarti. Sebaliknya,

kapal manual yang harus melelang di TPI hanya memperoleh harga rata-rata Rp 10.000 per kilogram saat musim paceklik, dan turun menjadi Rp 8.000 saat musim tangkap melimpah, atau bahkan di bawah itu jika kualitas ikan menurun karena mencairnya es balok sebagai satu-satunya pengawet ikan di kapal mereka. Variasi harga ini menyebabkan pendapatan nelayan manual semakin tertekan dalam kondisi oversupply, sedangkan nelayan freezer mampu memanfaatkan mekanisme “time arbitrage” di mana ikan beku dapat disimpan sampai harga pulih atau kembali tinggi. Ikan disimpan di cold storage – yang juga dimiliki oleh sebagian bakul ikan beku, pembeli utama mereka.

Tabel 4. Neraca Banding Retribusi dan Distribusi Pasar

Jenis Kapal	Retribusi (%)	Saluran Pemasaran
KF1	0.8	4
KF2	0.4	5
KF3	0.5	4
KF4	0.6	3
KF5	0.6	3
KM1	3.5	1
KM2	3.5	2
KM3	3.5	2
KM4	3.5	1
KM5	3.5	2

Sumber: Wawancara Nelayan dan Bakul Ikan September-Desember 2024

Tabel 4 menggambarkan hubungan antara tarif retribusi TPI dan jumlah saluran pemasaran yang diakses oleh sepuluh kapal nelayan – lima kapal freezer (KF1-KF5) dan lima kapal manual (KM1-KM5). Nelayan freezer, yang membayar retribusi rendah (0,4-0,8 %), memanfaatkan tiga hingga lima saluran distribusi – mulai tengkulak besar, pasar antarpulau, koperasi, hingga pasar tradisional. Sebaliknya, nelayan manual dengan tarif retribusi tetap 3,5 % umumnya hanya dilayani bakul ikan lokal, kecuali jika menangkap komoditas mahal seperti ikan dorang dan tongkol, yang kadang menarik minat pedagang besar lintas daerah.

Tabel 5. Hasil Hitung Regresi Linier

Model	R	R ₂	Adjusted R ₂	RMSE
M ₀	0.000	0.000	0.000	1.337
M ₁	0.886	0.786	0.724	0.702

Sumber: JASP

Analisis regresi linier menunjukkan bahwa kombinasi besaran retribusi dan jenis kapal secara bersama-sama mampu menjelaskan sekitar 78,6 % variasi dalam jumlah saluran pemasaran yang diakses nelayan ($R^2 = 0,786$; Adjusted $R^2 = 0,724$). Koefisien korelasi tinggi ($R = 0,886$) dan nilai RMSE rendah (0,702) mengindikasikan bahwa model ini memiliki daya prediksi yang baik dengan kesalahan prediksi rata-rata kurang dari satu saluran.

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Lengkap

Variabel	Koefisien (β)	Std. Error	t-Value	p-Value	Keterangan
Intercept	0.852	0.309	2.756	0.028	Signifikan
Jenis Kapal	1.842	0.419	4.396	0.003	Sangat Signifikan
Retribusi (%)	-0.932	0.325	-2.867	0.024	Signifikan arah negatif

Sumber JASP

Hasil analisis regresi linier Model M1 menunjukkan bahwa variabel “jenis kapal” dan “retribusi” bersama-sama menjelaskan 78,6 % perbedaan jumlah saluran distribusi ($R^2 = 0,786$; $F(2, 7) = 12,83$; $p = 0,005$). Artinya, model ini cukup andal untuk memprediksi akses distribusi nelayan. Secara rinci, kapal berpendingin rata-rata memiliki 1,84 saluran distribusi lebih banyak daripada kapal manual (nilai koefisien = +1,84; $p = 0,003$), sedangkan setiap kenaikan 1 % retribusi menyebabkan rata-rata saluran distribusi berkurang 0,93 jalur (nilai koefisien = -0,93; $p = 0,024$). Uji kelayakan asumsi, normalitas residual (Shapiro-Wilk $p > 0,05$) dan homoskedastisitas (Breusch-Pagan $p > 0,05$), menunjukkan tidak ada pelanggaran, sehingga hasil perhitungan ini dapat diandalkan secara statistik.

Tabel 7. Regresi dan Residual Durbin-Watson

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	f	P	
M ₁	Regression	12.650	2	6.325	12.833	0.005
	Residual	3.450	7	0.493		
	Total	16.100	9			

Sumber: JASP

Tabel hitung ANOVA dalam uji regresi linier dengan model Durbin-Watson pada table 6 (regresi dan residual) menghasilkan $F(2, 7) = 12,833$ dengan $p = 0,005$, menyatakan bahwa secara statistik variabel retribusi dan jenis kapal berkontribusi signifikan dalam menentukan diversifikasi jalur distribusi ikan. Dengan kata lain, Hasil hitung menunjukkan bahwa dengan mengetahui besar retribusi dan jenis kapal, kita bisa menebak sampai 79 % “berapa banyak” saluran distribusi pasar ikan yang akan mereka pakai. Hampir seluruh perbedaan jumlah tempat jual itu dijelaskan oleh dua faktor ini. Kalau retribusi tinggi dan model kapal manual, nelayan hanya punya satu atau dua pilihan pembeli – biasanya adalah bakul lokal. Sebaliknya, retribusi rendah ditambah kapal ber-freezer membuka tiga sampai lima jalur, dari tengkulak besar sampai pasar antar daerah.

Ketidakseimbangan kontribusi fiskal juga berdampak pada dinamika kekuatan tawar nelayan manual di TPI. Hasil wawancara turut menunjukkan bahwa meskipun kapal manual mulai tergerus dan semakin sedikit, pelayanan pencairan uang hasil lelang di TPI tidak semakin mudah. Dengan alasan perputaran uang turut mengecil volumenya. Bakul

lokal tidak berkembang dan terbina dengan baik. Hal ini mengurangi kesempatan nelayan kecil untuk mendapatkan slot lelang yang baik, mengakses informasi harga terkini, atau mengikuti program pelatihan mutu hasil tangkapan. Beberapa dari mereka justru sering kali terpaksa menjual ke pedagang kecil dengan harga yang lebih rendah di luar proses lelang.

D. Diskusi

Pada rumusan pertama, berdasarkan kerangka teori dualisme struktural Lewis seperti uraian Fields (2004), diilustrasikan bagaimana dua sektor – satu modern dan satu tradisional – berjalan paralel dalam satu ekosistem ekonomi, namun dengan akses dan perlakuan yang sangat berbeda (Missaglia & Vaggi, 2025). Kapal freezer mewakili sektor “modern” yang terintegrasi pasar dan didorong oleh teknologi pendingin, sementara kapal manual bertahan pada sistem subsisten yang dikendalikan regulasi dan infrastruktur minim. Ketimpangan ini bukan hanya tentang besaran angka pendapatan, melainkan juga mengenai keadilan distributif: apakah kebijakan publik, seperti subsidi BBM dan retribusi TPI, benar-benar menguntungkan semua lapisan nelayan, atau justru memperkuat dominasi yang sudah ada.

Hasil ini menunjukkan urgensi reformasi kebijakan. Jika tidak ada intervensi, disparitas akan terus melebar – nelayan manual semakin terjepit, TPI dan koperasi kehilangan relevansi, dan iklim sosial-ekonomi komunitas pesisir Sarang akan semakin rentan. Temuan ini menjadi landasan kuat untuk merancang sistem distribusi BBM berbasis kebutuhan operasional yang lebih berkeadilan, skema retribusi fleksibel atau progresif yang mengikutsertakan nelayan freezer, serta inisiatif pemberdayaan koperasi digital agar nelayan kecil dapat mengakses pasar dan fasilitas secara lebih setara. Hanya dengan langkah-langkah serentak inilah dualitas dan disparitas sosio-ekonomi nelayan di Sarang dapat diatasi – mewujudkan perikanan lokal yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Untuk permasalahan kedua, dengan menggunakan perspektif teori keadilan distributif dari Rawls (1971), situasi ini jelas menyalahi prinsip prioritas bagi yang paling tertinggal; nelayan kecil yang berkontribusi lebih besar justru menerima imbal hasil yang semakin kecil. Untuk memperbaiki kondisi, model retribusi progresif atau tarif voucher perlu diuji coba – di mana nelayan freezer tetap berkontribusi proporsional terhadap volume dan fasilitas yang mereka gunakan, tanpa menghilangkan insentif teknologi. Skema seperti ini bisa menjaga keberlanjutan fiskal TPI dan memperluas jaringan pemasaran untuk nelayan manual, meningkatkan keadilan fiskal dan pasar.

Fase ini menggarisbawahi bahwa tanpa intervensi kebijakan yang menyeimbangkan kembali kontribusi fiskal dan mengintegrasikan mekanisme distribusi formal dengan saluran informal, disparitas sosial-ekonomi di Sarang Rembang akan terus mengakar – sebagaimana telah digarisbawahi oleh Abdullah (2014) Rekomendasi strategis meliputi penyesuaian tarif retribusi berdasarkan ukuran kapal dan volume tangkapan, pemberian insentif pajak untuk investasi teknologi nelayan kecil, serta penguatan kerjasama koperasi yang memfasilitasi akses langsung ke pasar regional.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan antara nelayan yang memanfaatkan teknologi pendingin dan mereka yang bergantung pada es balok bukan sekadar persoalan modal atau teknik menangkap ikan, melainkan cerminan mekanisme kebijakan dan kelembagaan yang memberi keunggulan tidak proporsional bagi aktor bermodal besar. Data kuantitatif memperlihatkan perbedaan pendapatan hingga lima kali lipat, sementara analisis kualitatif mengungkap bagaimana praktik bypass retribusi meruntuhkan peran TPI sebagai pengendali harga dan distribusi. Temuan ini menguatkan kerangka dualisme struktural—dua sektor berjalan beriringan namun dengan akses dan hasil yang sangat berbeda—serta menggambarkan kegagalan keadilan politik-ekonomi ketika subsidi BBM dan retribusi diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan kapasitas operasional. Selain mengungkap disparitas sosial-ekonomi yang tajam, studi ini menawarkan wawasan tentang bagaimana institusi lokal, seperti koperasi, paguyuban nelayan dan paguyuban bakul, dapat berperan secara berkesinambungan dalam melahirkan iklim yang sehat, kompetitif dan berkeadilan sosial, tentunya dengan peran aktif pemerintah bersama jajarannya. Reformasi kebijakan fiskal dan perbaikan tata kelola kelembagaan sangat penting untuk menjembatani jurang ini, sekaligus menjaga kelangsungan sosial dan ekonomi komunitas nelayan kecil.

Pada akhirnya, para peneliti memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi ulang struktur tarif retribusi TPI. Bagaimanapun peraturan tetaplah peraturan. Meski demikian, perlu mengkaji urgensi dan perbaruan peraturan retribusi secara fleksibel, dan jika perlu mengupayakan model baru lelang tertutup untuk menumbuhkan iklim yang kompetitif di antara penjual, dan mengendalikan harga komoditas hasil tangkap. Indikator keberhasilan di poin rekomendasi ini adalah penurunan selisih antara estimasi retribusi ideal dan realisasi $\geq 20\%$ dalam 12 bulan.
2. Mengembangkan protokol lelang tertutup dengan mekanisme yang dapat diterima oleh kapal freezer dan lelang terbuka untuk kapal manual. Selain itu perlu mekanisme deposit yang proporsional oleh bakul yang mengikuti lelang di hari yang sama sehingga menjamin kesehatan sirkulasi keuangan di TPI. Perlu juga dikaji tentang uji coba platform digital yang mencatat setiap transaksi produksi ikan beku sebelum penjualan langsung, sekaligus memastikan kontribusi retribusi yang tercatat rapi dan diproses melalui sistem TPI yang integral. Indikator keberhasilannya adalah $\geq 80\%$ kapal freezer terdaftar dalam platform lelang tertutup dalam 6 bulan.
3. Penyesuaian alokasi subsidi BBM digerakkan dengan menyusun matriks distribusi berbasis frekuensi trip, volume tangkapan, dan jarak tempuh, sehingga nelayan kecil yang melakukan pelayaran pendek mendapatkan bagian subsidi yang proporsional

dan kesenjangan biaya operasional dapat diperkecil. Artinya, semakin besar model kapal dan alat tangkap, disparitas harga BBM perlu diperjelas, jika perlu melakukan subsidi silang secara mandiri. Sebelumnya, KUD dan paguyuban nelayan telah mengupayakan setiap tahunnya santunan beras untuk nelayan yang kurang mampu. Dengan skema yang tepat, subsidi silang BBM mandiri dapat mengoptimalkan program untuk nelayan yang kurang mampu dalam bentuk atau skema yang lain yang lebih bermanfaat dan berkeadilan sosial. Skema tersebut merupakan indikator keberhasilan poin ini.

4. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan dari KUD serta paguyuban nelayan dan kelompok bakul, yang dilakukan melalui penguatan kapasitas manajerial dan transparansi kelembagaan. Koperasi dapat difokuskan sebagai pusat logistik dan komunikasi masyarakat nelayan. Paguyuban nelayan dan paguyuban bakul menyiapkan ajang komunikasi tersebut hingga berjalan secara paripurna. Semua lembaga nelayan di sini dapat difungsikan untuk mengoptimalkan hasil tangkapan nelayan manual secara lebih terstruktur, memperluas akses ke pasar luar daerah, serta mengurangi ketergantungan pada bakul individu yang selama ini mendominasi rantai distribusi secara informal. KUD dan pemerintah juga perlu aktif menarik bakul dari luar Sarang untuk aktif dan menumbuhkan iklim kompetitif di sektor perikanan di Sarang. Indikator keberhasilan dari ini adalah peningkatan kapasitas bakul dari luar sarang, dan kenaikan pembelian hasil tangkapan melalui Koperasi dan kelompok bakul sebesar 25 %.
5. Penyusunan studi panel longitudinal yang diinisiasi untuk memantau dampak jangka menengah dan panjang dari reformasi retribusi, subsidi, dan mekanisme lelang baru, dengan pengumpulan indikator kuantitatif (perubahan pendapatan, volume lelang, kontribusi fiskal) serta wawancara kualitatif untuk menilai persepsi keadilan dan kepercayaan kelembagaan. Indikator outcomenya adalah perubahan pendapatan, volume lelang, dan kontribusi fiskal $\geq 15\%$ di setiap gelombang (jangka menengah dan panjang).

Daftar Pustaka

- Abdullah, H. (2014). Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 117-128. <https://doi.org/10.21787/JBP.06.2014.117-128>
- Abdullah, S., Radjab, M., Djibe, S., Arifin, A., & Anriani, H. B. (2023). Manajemen dan Resolusi Konflik Komunitas Nelayan di Sulawesi Selatan: Studi Kasus Komunitas Nelayan Etnis Bugis dan Makassar. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), Article 1. <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/63>
- Fatmawati, A., Yudha, A. T. R. C., & Syafaq, H. (2020). *Kontrak Kerja dan Kesejahteraan ABK Nelayan Perspektif Etika Bisnis Islam di Sarangmeduro, Jawa Tengah* | NUKHBATUL

Fields, G. S. (2004). DUALISM IN THE LABOR MARKET: A PERSPECTIVE ON THE LEWIS MODEL AFTER HALF A CENTURY. *The Manchester School*, 72(6), 724–735. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2004.00432.x>

JDIH BPK. (n.d.). jdih.bpk.go.id

Kerrigan, M. R. (2014). A Framework for Understanding Community Colleges' Organizational Capacity for Data Use: A Convergent Parallel Mixed Methods Study. *Journal of Mixed Methods Research*, 8(4), 341–362. <https://doi.org/10.1177/1558689814523518>

Merdiana, S. E., Wibowo, B. A., & Mudzakir, A. K. (2024). Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Misoyo Mardi Mino dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 7(1), Article 1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/19036>

Missaglia, M., & Vaggi, G. (2025). Dualism, Development, Growth and Structural Change: Arthur Lewis Comes Back. In M. Missaglia & G. Vaggi (Eds.), *Introduction to Development Economics: An Alternative Approach to Growth, Sustainability and Cooperation* (pp. 117–128). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-67926-1_8

Murtaqi, M. R., Suryanti, S., Ardiyanti, A. R., Prasetyo, A., & Anggitiara, N. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui Pembentukan Kelompok Baru dalam Mewujudkan Desa Maritim Unggul Tapak, Semarang, Jawa Tengah. *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 377–384. <https://doi.org/10.54082/ijpm.271>

PERPRES No. 191 Tahun 2014. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved June 13, 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/41710/perpres-no-191-tahun-2014>

Prasetyo, A. B., Setiyanto, I., & Hapsari, T. D. (2016). Anslidid Udshs Perikanan TTangkap Kapal Purse Seine Berpendingin Freezer Dibandingkan dengan Es di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo, Juwana, Kabupaten Pati. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 5(1), Article 1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/10738>

Purwantini, S., & Saraswati, I. (2022). Analisis Regulasi Kelaiklautan Dan Keselamatan Terhadap Pemasangan Alat Pendingin Frezeer Pada Kapal Ikan. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 4(2), 12–20. <https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v4i2.53>

Rawls, J. (1971). An egalitarian theory of justice. *Philosophical Ethics: An Introduction to Moral Philosophy*, 365–370.

Roberts, N., Mengge, B., Utina, Muh. R., Muhatar, F., Anugerah, Iawardanhi, A., Muhammad Zulkifli, R., & Humphries, A. (2022). Patron-client relationships shape value chains in an Indonesian island-based fisheries system. *Marine Policy*, 143, 105142. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105142>

Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., Steenbergen, D. J., & Fitriana, R. (2021). Developing sustainable small-scale fisheries

livelihoods in Indonesia: Trends, enabling and constraining factors, and future opportunities. *Marine Policy*, 132, 104654.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654>

Syatori, A. (2016). Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon). *Holistik: Journal for Islamic Social Sciences*, 15(2), Article 2.
<https://doi.org/10.24235/holistik.v15i2.330>

Peraturan Perundangan yang telah diperiksa sebagai *cross-references*:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Tahun 1997 tentang Larangan Penjualan Ikan di Luar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecuali untuk Kebutuhan Rumah Tangga Nelayan
6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Bagi Pelaku Usaha Kegiatan Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi oleh Kapal Perikanan
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2015
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan